

## Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat

Indria Widyastuti<sup>1</sup>, Anis Sahara<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika  
e-mail: indria\_w2001@yahoo.com

<sup>2</sup>Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3i Jakarta  
e-mail: anis\_sahara@yahoo.com

---

**Cara Sitasi:** Widyastuti, I., & Sahara, A. (2018). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat. *Moneter*, 5(2), 177–184.

---

**Abstract** - The aim of the government to establish Kawasan Berikat (KB) is to increase efficiency by bringing the supply of raw materials to the needs of the domestic industry in a timely manner, as well as the availability of promotional facilities to support its marketing, which in turn is expected to increase the competitiveness of export products in the global market. Companies especially those engaged in manufacturing in carrying out their business activities certainly need raw materials. To get the raw material, the company must get it from another party by making a transaction called purchase. Purchase transactions can be classified into two, namely local purchases and import purchases. The issuance of the Decree of the Director General of Customs and Excise No.431 / BC / 2001 which stipulates the imposition of VAT on capital goods and factory equipment that are directly related to PDKB activities originating from other Indonesian Customs Areas (DPIL). The solution to the problem: the imposition of VAT on the purchase of capital goods from other Indonesian Customs Areas (Domestic) in accordance with the provisions of article 2 paragraph (2) PP No. 33 of 1996 stated that "for the delivery of domestic taxable goods to bonded stockpiling sites facilities are given free of charge VAT & PPnBM.

**Keywords:** accounting information system, purchase, import

### PENDAHULUAN

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan pembentukan Kawasan Berikat (KB) adalah peningkatan efisiensi dengan mendekatkan persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widowati, 2017) : Pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dari pengeluaran PPN di kawasan berikat yang diutamakan untuk impor adalah untuk mendukung pertahanan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kehidupan bangsa, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mempertahankan pembangunan nasional. Perusahaan terutama yang bergerak di bidang manufaktur dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku tersebut maka perusahaan harus mendapatkannya dari pihak lain dengan cara melakukan transaksi yang disebut pembelian. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri dan pembelian impor adalah pembelian

dari pemasok luar negeri. Oleh karena itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Liana, 2012) dapat disimpulkan bahwa : Desain Aplikasi Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku perlu untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat membantu bagian gudang untuk merencanakan secara akurat jumlah persediaan bahan baku di dalam gudang, kapan harus memesan bahan baku ke pemasok serta kapan pemasok mengirim bahan baku. Hal ini akan berakibat perusahaan tidak pernah kekurangan bahan baku dan tidak pernah akan menyimpan persediaan bahan baku secara berlebihan. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Paulus Hartanto, 2016) : Pengendalian Persediaan bahan baku merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena persediaan merupakan investasi perusahaan yang besar nilai maupun fungsinya. Perusahaan perlu menerapkan perencanaan mengenai pengendalian persediaan yang memperkirakan ketepatan pengiriman dan ketepatan jumlah atau volume bahan baku. Manajemen persediaan yang diterapkan dengan baik akan menghasilkan kinerja produksi yang baik dan tepat waktu.

### Latar Belakang Masalah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Paulus Hartanto, 2016): Peran Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) adalah salah satu lembaga pemerintah

yang memiliki peran sangat penting dalam mendorong perekonomian nasional. Sebagai petugas fiskal dan juga sebagai kontrol terhadap lalu lintas barang baik impor atau ekspor, DJBC mengembangkan tugas & tanggung jawab yang besar. Akan tetapi pada pelaksanaannya, proses impor & ekspor di kawasan berikat masih terdapat beberapa kendala. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ministry, National, Competitiveness, & Haryana, 2017) : Lamanya dwelling time proses pengadaan bahan baku & bahan penolong dari luar negeri (impor) akan menghambat & berdampak pada peningkatan biaya logistik terutama pada biaya pengadaan & penyimpanan bahan baku. Pada akhirnya biaya logistik yang tinggi akan berdampak pada produksi yang tidak efisien & rendahnya daya saing.

#### Identifikasi Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (T. Sihaloho & Muna, 2010): Terdapat beberapa identifikasi masalah yang sering terjadi di kawasan berikat terutama yang berkaitan dengan proses impor bahan baku, diantaranya :

1. Pelayanan perijinan satu atap di kawasan berikat (KB) tidak berjalan sebagaimana mestinya setelah otonomi daerah, hal ini membawa konsekuensi waktu biaya yang makin besar yang harus ditanggung oleh pengusaha di kawasan berikat.
2. Kurangnya pemahaman berbagai pihak terkait akan keberadaan & fungsi KB menyebabkan munculnya intervensi melalui berbagai peraturan daerah yang diterapkan di kawasan berikat.
3. Persetujuan Berusaha di Kawasan Berikat (PDKB) sering diinterpretasikan oleh Kepala Bea Cukai di KB sebagai ijin operasi yang akan menimbulkan ketidakpastian ditambah tidak jelasnya berapa lama surat PDKB tersebut bisa diterbitkan & didapatkan pengusaha. Hal tersebut dapat menghambat program & jadwal yang telah disepakati investor dengan pemasok & Pembeli dari luar negeri yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya kepercayaan kepada investor di kawasan berikat.

#### Rumusan Masalah

PT Byung Hwa Indonesia yang dipilih sebagai tempat riset adalah merupakan salah satu perusahaan otomotif Korea di Kawasan Industri Jababeka yang merupakan salah satu kawasan berikat di wilayah Kabupaten Bekasi. Barang-barang impor biasa diadakan oleh PT Byung Hwa Indonesia adalah bahan baku besi dan *sparepart*. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh investor dalam melaksanakan proses impor bahan baku di kawasan berikat maka disusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian impor pada PT Byung Hwa Indonesia?

2. Dokumen-dokumen apa saja yang digunakan saat pelaksanaan pembelian impor pada PT Byung Hwa Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pembelian kredit pada PT Byung Hwa Indonesia?
4. Permasalahan apa saja yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi pembelian kredit pada PT Byung Hwa Indonesia?

#### Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut (Mulyadi, 2016) : Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut (Krismiaji, 2015) adalah : Sistem Informasi Akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan interaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Demikian pula menurut penelitian yang dilakukan oleh (Juwitasary & Martani, 2015) : Sistem Informasi Akuntansi adalah subsistem dari sistem informasi yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi akuntansi dan informasi lain yang berkaitan dengan suatu kejadian bisnis dalam proses rutin transaksi akuntansi.

#### Pengertian Impor

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Budiarso, 2016) : Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri.

#### Pengertian Kawasan Berikat

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tumpal Sihaloho & Muna, 2010) : Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya melakukan kegiatan usaha industry pengolahan barang & bahan, kegiatan rancang bangun perkerataasan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir & pengepakan atas barang & bahan asal impor atau barang & bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Adapun kriteria dari Kawasan Berikat :

Tujuan: Manufaktur, Luas Lokasi: 20 ha sd 1.600 ha, Lokasi: dekat dengan pelabuhan & bandara, Jenis Kegiatan: terutama bidang manufaktur, Tujuan Pasar: ekspor, Perlakuan pembelian dari dalam negeri: diperlakukan sebagai pembeli dalam negeri & kena PPN, Otoritas dari Kawasan: umumnya dibawah pemerintahan pusat atau daerah setempat.

Untuk mendukung kelancaran proses impor selanjutnya pemerintah mendirikan Pusat Logistik Berikat (PLB). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Laksono & Kristiantoro, 2017): Pusat Logistik

Berikat (PLB) didesain sebagai penyempurnaan konsep Kawasan Berikat. PLB adalah solusi untuk mengatasi inefisiensi pengelolaan logistic. Ide utama dari kebijakan PLB adalah untuk menempatkan gudang penimbunan ekspor & impor dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri tidak perlu selalu mengimpor lagi ketika membutuhkan bahan baku, barang modal dan bahan pendukung

## METODOLOGI PENELITIAN

### Metodologi Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Deskriptif adalah metode yang menurunkan dan menafsirkan data yang ada. Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam menunjang tercapainya tujuan penelitian ini, penulis memerlukan data-data yang relevan yang bersumber dari:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)  
Penulis memperoleh data dengan mengumpulkan dan membaca berbagai buku referensi serta sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan sistem akuntansi pembelian impor.
2. Studi Lapangan (*Field Research*)  
Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan mengamati aktivitas dan kegiatan yang dilakukan, yang berhubungan dengan objek penelitian yang dibahas dalam penelitian sehingga memperoleh data yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengamatan  
Penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu pada PT. Byung Hwa Indonesia dengan mengamati sistem akuntansi pembelian impor pada PT Byung Hwa Indonesia.
  - b. Wawancara  
Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan antara lain dengan bagian Exim, Pembelian dan Akunting.
  - c. Studi Dokumentasi  
Melakukan pengambilan data-data dengan mendokumentasikan bukti-bukti ataupun data-data yang terkait dan berhubungan dengan sistem akuntansi pembelian impor.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di PT Byung Hwa Indonesia yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka 1, Jalan Jababeka VI Blok J/4-A Harjamekar Cikarang Utara, Bekasi, 17530, Indonesia. Phone: (021) 893-5001 Fax: (021) 893-5003
2. Waktu Penelitian  
Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2018 sampai dengan September 2018

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pihak-pihak yang terkait dengan Sistem Akuntansi Pembelian Impor pada PT Byung Hwa Indonesia

Dalam pelaksanaan pembelian impor terdapat beberapa pihak-pihak terkait untuk mendukung proses pembelian impor, antara lain:

- a. Departemen Gudang  
Jika terdapat barang habis, maka pihak gudang segera membuat surat permintaan bahan baku dengan menggunakan dokumen *Advance for stationery* dan diberikan kepada departemen *purchasing*
- b. Departemen *Purchasing*  
*Purchasing* menginformasikan rencana pembelian dengan mengirimkan *purchase order* melalui *e-mail* kepada pemasok dan selanjutnya melakukan negoisasi agar terjadi kesepakatan. Setelah terjadi kesepakatan, *purchasing* menerima kelengkapan dokumen impor yang telah disiapkan oleh pemasok luar negeri seperti *invoice*, *packing list* dan *bill of lading*.
- c. Departemen Exim  
Pada departemen ini, Exim menerima dan mengecek kelengkapan dokumen impor dari pemasok luar negeri dan dokumen *purchase order* dari *purchasing*. Departemen exim menerima informasi jadwal kedatangan barang impor dari agen pengiriman (*forwarder*). Kemudian *staff* exim membuat dokumen pemberitahuan impor untuk *customs clearance* dan berkoordinasi dengan *forwarder* untuk memastikan barang impor bisa terkirim.
- d. Departemen Akunting  
Akunting bertugas untuk mengecek *invoice* yang sudah jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo agar dapat didahulukan pembayarannya. Apabila sudah dilakukan pembayaran, akunting memasukan transaksi ke jurnal sistem. Pembayaran dilakukan dengan sistem transfer bank.

### 2. Dokumen-dokumen yang digunakan saat Pelaksanaan Pembelian Impor pada PT Byung Hwa Indonesia

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan saat pelaksanaan pembelian impor antara lain:

- a. *Advance For Stationary* (AFS)

Dokumen ini dibuat oleh departemen gudang yang berisi rincian barang yang dipesan termasuk nama produk dan jumlah barang yang dipesan.

- b. *Purchase Order* (PO)  
*Purchase order* adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli (*purchasing*) yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Dokumen ini berisi rincian barang yang akan dibeli oleh pihak *purchasing* termasuk nama produk, jumlah barang yang dibeli, dan harga yang dicantumkan oleh *purchasing*.
- c. *Invoice*  
 Dokumen ini dibuat oleh *supplier* luar negeri yang digunakan sebagai suatu bukti pembelian dengan mencantumkan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Karena pembelian impor, maka *invoice* dikirimkan melalui *e-mail* dan kemudian *invoice* tersebut didistribusikan ke pihak-pihak terkait.
- d. *Packing List*  
 Dokumen ini dibuat oleh *supplier* luar negeri yang berisi rincian barang yang akan dikirim seperti nama, kode dan jumlah barang, berat bersih, berat kotor, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal. Nomor dan tanggal yang digunakan sesuai dengan data *invoice*.
- e. *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB)  
 Dokumen ini diterbitkan oleh pihak pelayaran yang diberikan kepada pemasok luar negeri dan kemudian diberikan kepada *purchasing* PT Byung Hwa Indonesia. *Bill of lading* atau biasa disebut dengan B/L adalah dokumen pengangkutan barang melalui jalur laut dan *Airway bill* / AWB adalah dokumen pengangkutan barang melalui jalur udara. Dokumen ini memuat informasi lengkap *Shipper*, *Consignee*, nama dan bendera kapal, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar, data muatan, nomor B/L dan tanggal dikeluarkannya barang yang ditentukan oleh pihak pelayaran.
- f. Pemberitahuan Impor Barang BC 2.3  
 Dokumen ini dibuat oleh pihak exim dengan menggunakan sistem ceisa TPB. Sistem ceisa (*Customs Excise Information System and Automation*) TPB merupakan aplikasi penyampaian dokumen secara elektronik yang mengintegrasikan semua jenis dokumen perijinan Kawasan Berikat dalam satu aplikasi. Dokumen BC 2.3 digunakan untuk pengurusan dokumen impor yang memuat informasi tentang nama pemasok, importir, PPJK, sarana pengangkut, data dokumen (*invoice*, *packing list* dan *bill of lading/airway bill*), nomor pendaftaran dan tanggal bc 2.3, perhitungan pajak dalam rangka impor, dan data barang impor.
- g. SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang)  
 Dokumen ini didapat dari respon ceisa TPB. Saat pembuatan dokumen BC 2.3, apabila data sudah sesuai dengan dokumen pelengkap impor, maka

dokumen BC 2.3 dikirim dan akan mendapat respon berupa SPPB.

### 3. Pelaksanaan Sistem Informasi Pembelian Bahan Baku Impor Pada PT Byung Hwa Indonesia

#### a. Jaringan Prosedur

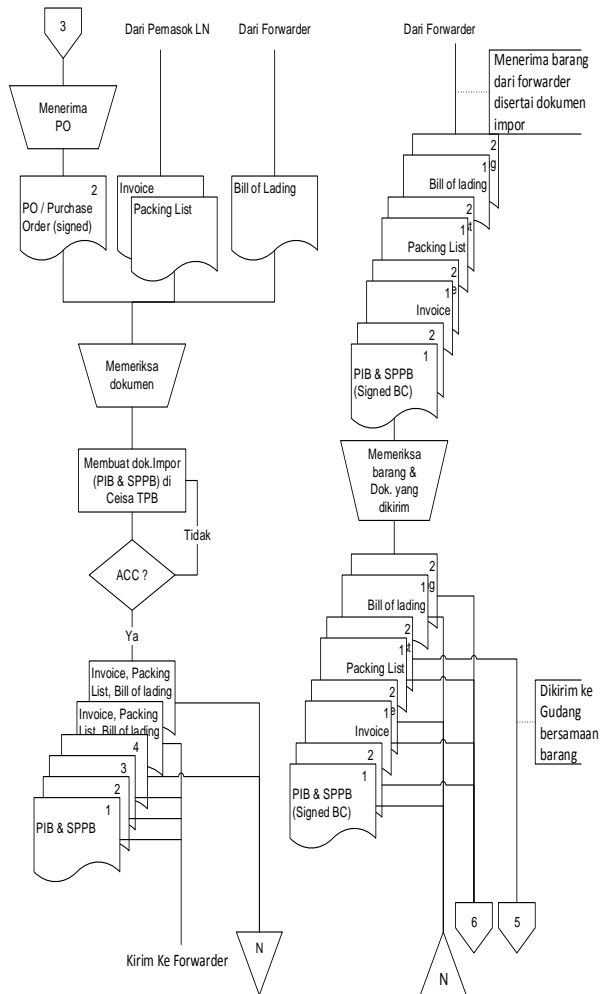
- 1) Prosedur Permintaan Barang Impor  
 Dalam prosedur ini, departemen gudang atau departemen yang bersangkutan mengajukan permintaan pembelian dalam surat permintaan barang dengan menggunakan dokumen *Advance for stationery* kepada departemen *purchasing*.
- 2) Prosedur Pemesanan Barang  
 Dalam prosedur ini, departemen *purchasing* mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada *supplier* luar negeri untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain untuk memungkinkan pemilihan *supplier* barang yang diperlukan perusahaan.
- 3) Prosedur Penerimaan Barang  
 Departemen exim menerima barang yang telah dikirim oleh *supplier* luar negeri melalui jasa *forwarder*. Setelah itu, barang impor tersebut diberikan ke gudang untuk segera di cek oleh departemen gudang.
- 4) Prosedur Pencatatan Hutang  
 Departemen akunting akan menjurnal setiap pembelian yang terjadi di sistem perusahaan. Setiap hutang yang terjadi dalam perusahaan hendaknya dicatat sesuai dengan faktur atau dokumen sejenisnya sebagai tanda bukti adanya pembayaran yang tertunda. Berikut merupakan pencatatan transaksi pembelian pada PT Byung Hwa Indonesia.

PT Byung Hwa Indonesia					
General Journal					
Date	Transaction Number	Transaction Description Account Description	Debet (USD)	Credit (USD)	
0	17-Jan-18 BH180117-1	Impor Byung Hwa Precesion Korea			
1	17-Jan-18 BH180117-1	Pembelian BB	58.379,90		
2	17-Jan-18 BH180117-1	Hutang Dagang			58.379,90
8	13-Feb-18 BH180213-1	Impor Byung Hwa Precesion Korea			
9	13-Feb-18 BH180213-1	Pembelian BB	32.679,35		
0	13-Feb-18 BH180213-1	Hutang Dagang			32.679,35
5	07-Mar-18 BH180307-1	Impor Byung Hwa Precesion Korea			
6	07-Mar-18 BH180307-1	Pembelian BB	36.738,08		
7	07-Mar-18 BH180307-1	Hutang Dagang			36.738,08
18		Sub Total	127.797,33		127.797,33

Sumber : Data Akuntansi PT Byung Hwa Indonesia

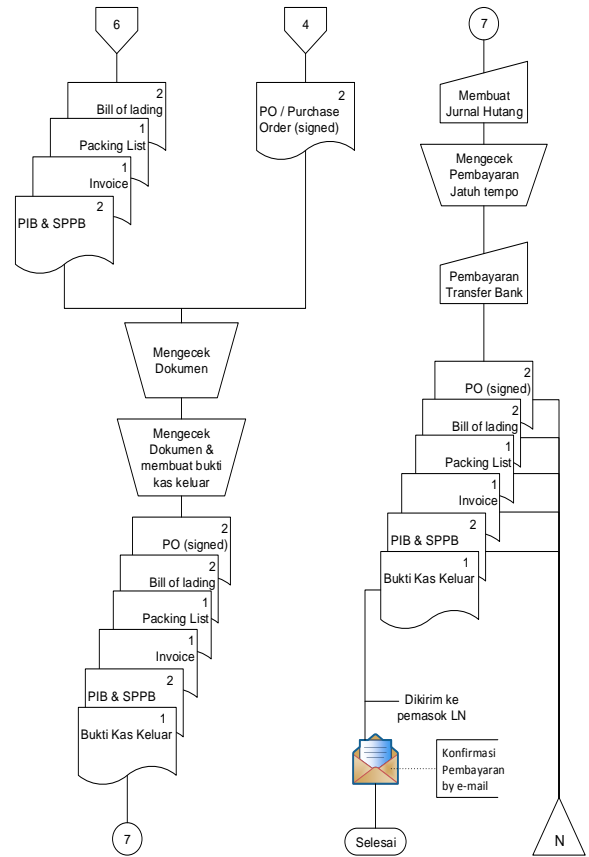
Gambar 1 Jurnal Transaksi Pembelian Impor





Sumber : Data Diolah  
 Gambar 5 Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Dept. Akunting

**e. Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Departemen Akunting**



Sumber : Data Diolah  
 Gambar 6 Flowchart Pembelian Bahan Baku Impor pada Dept. Akunting

**f. Penjelasan Flowchart**

Adapun penjelasan flowchart sebagai berikut:

- 1) Dimulai pada departemen gudang dengan mengecek stok persediaan bahan baku digudang. Jika barang hampir habis, segera membuat surat permintaan pembelian dengan menggunakan dokumen *Advance For Stationery* (AFS) yang dibuat sebanyak 2 lembar. Untuk lembar yang pertama diberikan ke departemen *purchasing* dan lembar yang kedua diarsipkan oleh departemen gudang sebagai dokumentasi berdasarkan tanggal dokumen dibuat. Permintaan bahan baku harus disepakati dan disetujui oleh *Asst. Manajer Gudang*.
- 2) Departemen *purchasing* menerima dokumen AFS dari departemen gudang yang kemudian membuat surat penawaran harga yang dikirimkan ke *supplier* luar negeri melalui *e-mail* selanjutnya departemen *purchasing* menerima konfirmasi dari *supplier* luar negeri mengenai surat penawaran harga. Setelah itu, membuat dan mengajukan *purchase order* (PO) ke *General Manajer* (GM). Apabila PO disetujui maka GM menandatangani dokumen tersebut. Dan apabila ditolak maka PO tersebut dikembalikan ke *purchasing* untuk diperbaiki. PO dibuat sebanyak 3 lembar. Untuk lembar pertama di-*scan* dan dikirimkan ke *supplier* luar negeri melalui *e-mail* yang

kemudian akan diarsipkan oleh *purchasing* berdasarkan nomor dokumen PO. Lembar kedua PO tersebut diberikan kepada departemen akunting dan lembar ketiga diberikan kepada departemen exim.

- 3) Exim menerima PO yang sudah ditandatangani oleh GM dari *purchasing*. Selain itu, exim menerima *invoice*, *packing list* dari *supplier* luar negeri dan menerima *bill of lading* dari *forwarder*. Dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan disesuaikan. Apabila sudah sesuai, departemen exim membuat dokumen pemberitahuan impor barang (PIB BC 2.3) dan SPPB untuk proses *customs clearance*. PIB dan SPPB dibuat sebanyak 4 lembar. Untuk lembar 1-3 diberikan ke *forwarder* dan untuk yang lembar ke-empat diarsipkan berdasarkan nomor dokumen. Setelah proses *custom clearance* selesai, *forwarder* mengirimkan dokumen beserta barang impor ke PT Byung Hwa Indonesia. Exim memeriksa dokumen impor dan mendistribusikan dokumen dan barang ke pihak-pihak terkait.
- 4) Gudang menerima *packing list* dan barang impor. Barang dan dokumen diperiksa apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian barang disimpan di gudang bahan baku dan dokumen di input dalam kartu stok dan diarsipkan berdasarkan nomor dokumen.
- 5) Pihak akunting menerima dokumen PO lembar kedua dari *purchasing* dan menerima *invoice*, *packing list*, *bill of lading*, PIB BC 2.3 dan SPPB dari exim. Dokumen-dokumen tersebut diperiksa dan jika sudah sesuai maka akunting membuat bukti kas keluar yang kemudian membuat jurnal hutang. Setelah itu mengecek pembayaran yang sudah jatuh tempo. Manajer akunting melakukan transfer untuk pembayaran hutang melalui Bank. Setelah melakukan pembayaran, akunting melakukan konfirmasi kepada *supplier* luar negeri melalui *e-mail* dan dokumen-dokumen tersebut diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor dokumen.

##### **5. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sistem akuntansi pembelian kredit pada PT Byung Hwa Indonesia**

- a. Dikeluarkannya SK Dirjen Bea dan Cukai No.431/BC/2001 yang menetapkan adanya pengenaan PPN atas barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan PDKB yang berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).  
Pemecahan masalahnya: pengenaan PPN atas pembelian barang modal asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (Dalam Negeri) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No 33 tahun 1996 dinyatakan bahwa "atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN & PPnBM.

- b. Sesuai keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 176/P/2000 pasal 2 menyebutkan jasa perawatan mesin, peralatan & sparepart tergolong jenis jasa yang dikenakan PPN. Hal ini tentu saja dirasa memberatkan investor karena hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan pesanan dengan spesifikasi dan merek yang sudah ditentukan oleh buyer.

Pemecahan masalahnya: pengenaan PPN atas pembelian barang modal asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (Dalam Negeri) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No 33 tahun 1996 dinyatakan bahwa "atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN & PPnBM termasuk didalamnya untuk jasa perawatan mesin (sparepart) dan jasa maklon.

- c. Sering terjadi perbedaan persepsi antara investor (PDKB) dengan petugas Bea & Cukai mengenai pengertian barang modal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan proses produksi. Hal ini pada akhirnya sangat merugikan investor karena dapat menimbulkan "moral hazard" dan investor harus membayar bea masuk dan pajak-pajak lainnya atas impor barang modal yang langsung berkaitan dengan proses produksi di dalam kawasan berikat.

Pemecahan masalahnya: sesuai keputusan Menteri Keuangan No 291/KMK.051997 pasal 14 ayat (b) dinyatakan bahwa atas impor barang modal atau peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB diberikan penangguhan BM, tidak dipungut PPN, PPnBM & PPh pasal 22 impor.

- d. Untuk masalah infrastruktur di kawasan berikat juga masih perlu diperhatikan karena infrastruktur jalan darat di kawasan berikat umumnya rusak dan macet. Kemacetan terutama terjadi diakses menuju Dry Port station (stasiun peti kemas) dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Pemecahan masalahnya: kawasan berikat berdasarkan PP No 26/2008 umumnya berada di lokasi Pusat Kajian Nasional (PKN) dan sesuai dengan kriteria pertama dari PKN yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.

##### **KESIMPULAN**

Tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan pembentukan Kawasan Berikat (KB) adalah peningkatan efisiensi dengan mendekati persediaan bahan baku bagi kebutuhan industri dalam negeri yang tepat waktu, serta tersedianya sarana promosi untuk mendukung pemasarannya yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global.

Perusahaan terutama yang bergerak di bidang manufaktur dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan bahan baku. Untuk mendapatkan

bahan baku tersebut maka perusahaan harus mendapatkannya dari pihak lain dengan cara melakukan transaksi yang disebut pembelian. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan pembelian impor.

Dikeluarkannya SK Dirjen Bea dan Cukai No.431/BC/2001 yang menetapkan adanya pengenaan PPN atas barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan PDKB yang berasal dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL).

Pemecahan masalahnya: pengenaan PPN atas pembelian barang modal asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (Dalam Negeri) sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) PP No 33 tahun 1996 dinyatakan bahwa "atas penyerahan barang kena pajak dalam negeri ke Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN & PPnBM

## REFERENSI

- Budiarso. (2016). ANALISIS PEMUNGUTAN dan PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 atas KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN dan PENGAWASAN BEA dan CUKAI KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 4, 753–762.
- Juwitasary, H., & Martani, M. (2015). ANALISA SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBELIAN dan PERSEDIAAN PT. XYZ. *Jurnal Comtech*, 6(1), 96–108.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi* (4th ed.). Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Laksono, J., & Kristiantoro, H. (2017). PENENTUAN PRIORITAS PEMILIHAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT BERDASAR ASPEK SUSTANABILITY. *Jurnal BPPK*, 10(1), 51–61.
- Liana, L. (2012). DESAIN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI BIAYA PERSEDIAAN PADA SISTEM MANUFAKTUR. *Dinamika Teknik*, VI(1), 1–13.
- Ministry, A. H., National, P., Competitiveness, I., & Haryana, A. (2017). Peran Pusat Logistik Berikat ( PLB ) Dalam Menurunkan Dwelling Time di Pelabuhan Indonesia. *Cendekia Niaga*, 1(January), 1–10.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Paulus Hartanto, A. (2016). SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BAHAN BAKU DENGAN METODE MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) DI CV. ISTANA PITA SEMARANG. *KOMPAK*, 9(1), 1–8. Retrieved from <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/180/172>

Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 4(1), 75–101.

Sihaloho, T., & Muna, N. (2010). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. *Litbang Perdagangan*, 4(1), 75–101.

Widowati, R. B. (2017). ENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS EKSPOR / IMPOR BARANG KENA PAJAK ( Studi Kasus PT Astra Honda Motor yang Melakukan Impor Kendaraan Toyota Dari Jepang ). *Jurnal Reportorium*, IV(2), 87–94.

Widyastuti, I., & Sahara, A. (2018). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku Impor Pada Kawasan Berikat. *Moneter*, 5(2), 177–184.

## PROFIL PENULIS

Penulis lahir pada 19 Nopember 1974 di Jember, mendapat gelar Sarjana Ekonomi (prodi Akuntansi) dari STIE Malangkeucewara lulus 1997 dan Magister Akuntansi (prodi Keuangan & Perbankan) dari Universitas Trisakti lulus tahun 2011. Saat ini menjadi salah satu dosen Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas BSI Jakarta dan memiliki Jabatan Fungsional Akademik Asisten Ahli. Tulisan ilmiah yang pernah dibuat salah satunya berhasil mendapatkan Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) dari Kopertis Wilayah III Jakarta tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK)